



# **Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2019**

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Disampaikan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi DIY  
Yogyakarta, 6 Maret 2018**

**1**

**Tema, Prioritas Nasional dan Sasaran RKP 2019**

**2**

**Penjabaran Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas dalam RKP 2019**

**3**

**Perkembangan dan Target Makro Tahun 2019 Provinsi DI Yogyakarta**

**4**

**Usulan Kegiatan Prioritas di Provinsi DIY Tahun 2019**

**1**

# **Tema, Prioritas Nasional dan Sasaran RKP 2019**

# RKP 2019 Sebagai Penutup Kabinet Kerja





**Menajamkan  
Prioritas Nasional**

**Memastikan  
Pelaksanaan  
Program**

**Menajamkan  
Integrasi  
Sumber Pendanaan**

2017

23 PN

154 PP

2018

10 PN

30 PP

2019

5 PN

24 PP

**Pengendalian Dilakukan  
Sampai ke Level Proyek  
(satuan 3)**

**Belanja K/L, Belanja Non K/L,  
Belanja Transfer ke Daerah, PHLN,  
BUMN, PINA dan Swasta**

**RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan)  
untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN**

## Tema

**“Pemerataan  
Pembangunan  
untuk  
Pertumbuhan  
Berkualitas”**



1

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

2

Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

3

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

4

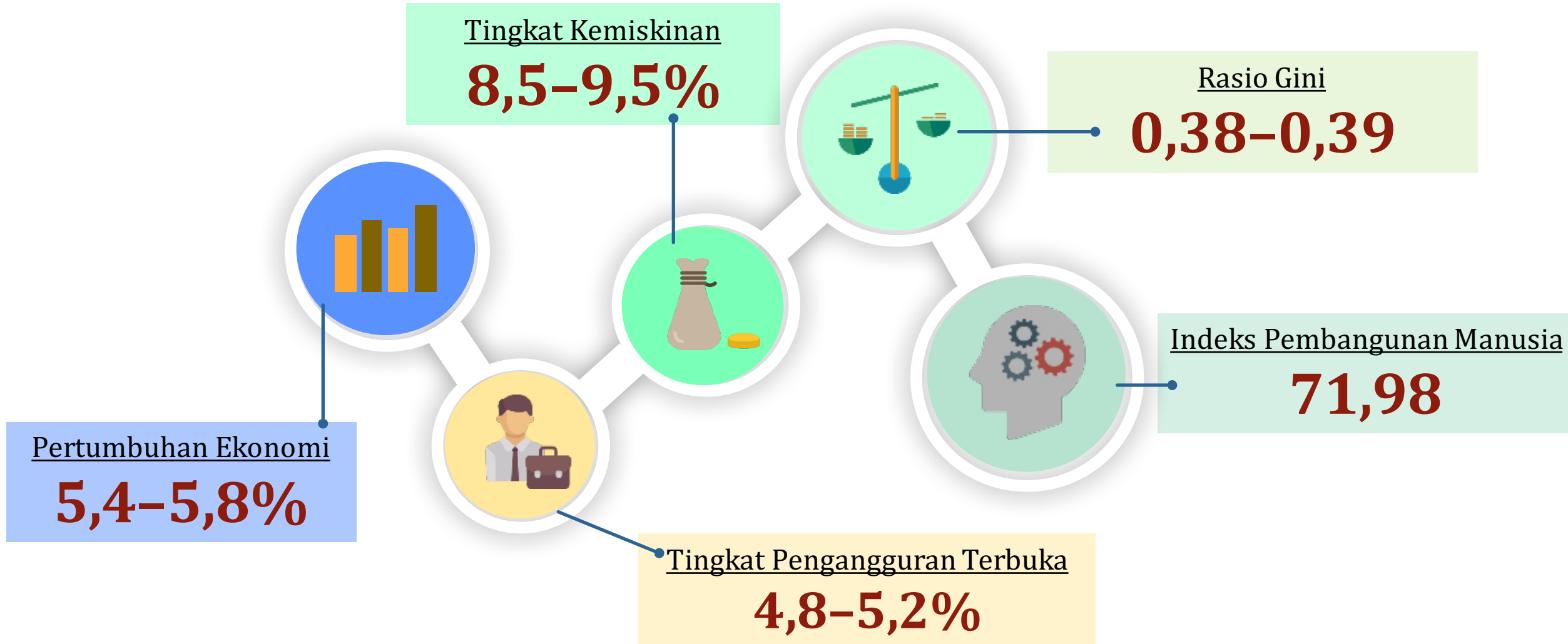
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

5

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

## Prioritas Nasional

# Target Pembangunan Tahun 2019



# 2

## **Penjabaran Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas dalam RKP 2019**



**Pembangunan Manusia melalui Pengurangan  
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar**

## Sasaran:

Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5–9,5 persen; IPM menjadi 71,98 dan gini rasio menjadi 0,38-0,39 pada tahun 2019

## Arah Kebijakan:



### Mempercepat Pengurangan Kemiskinan

1. Memperbaiki pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dan sistem jaminan sosial.
2. Memperbaiki literasi; reforma agraria; dan pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.



### Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.
3. Mempercepat penurunan *stunting*.
4. Memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit.
5. Memperkuat upaya promotif & preventif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
6. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.



### Memeratakan Layanan Pendidikan Berkualitas

1. Melaksanakan program wajib belajar 12 tahun.
2. Meningkatkan kualitas pendidik dan penempatan guru yang merata.
3. Menyediakan afirmasi pendidikan.
4. Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan.
5. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.



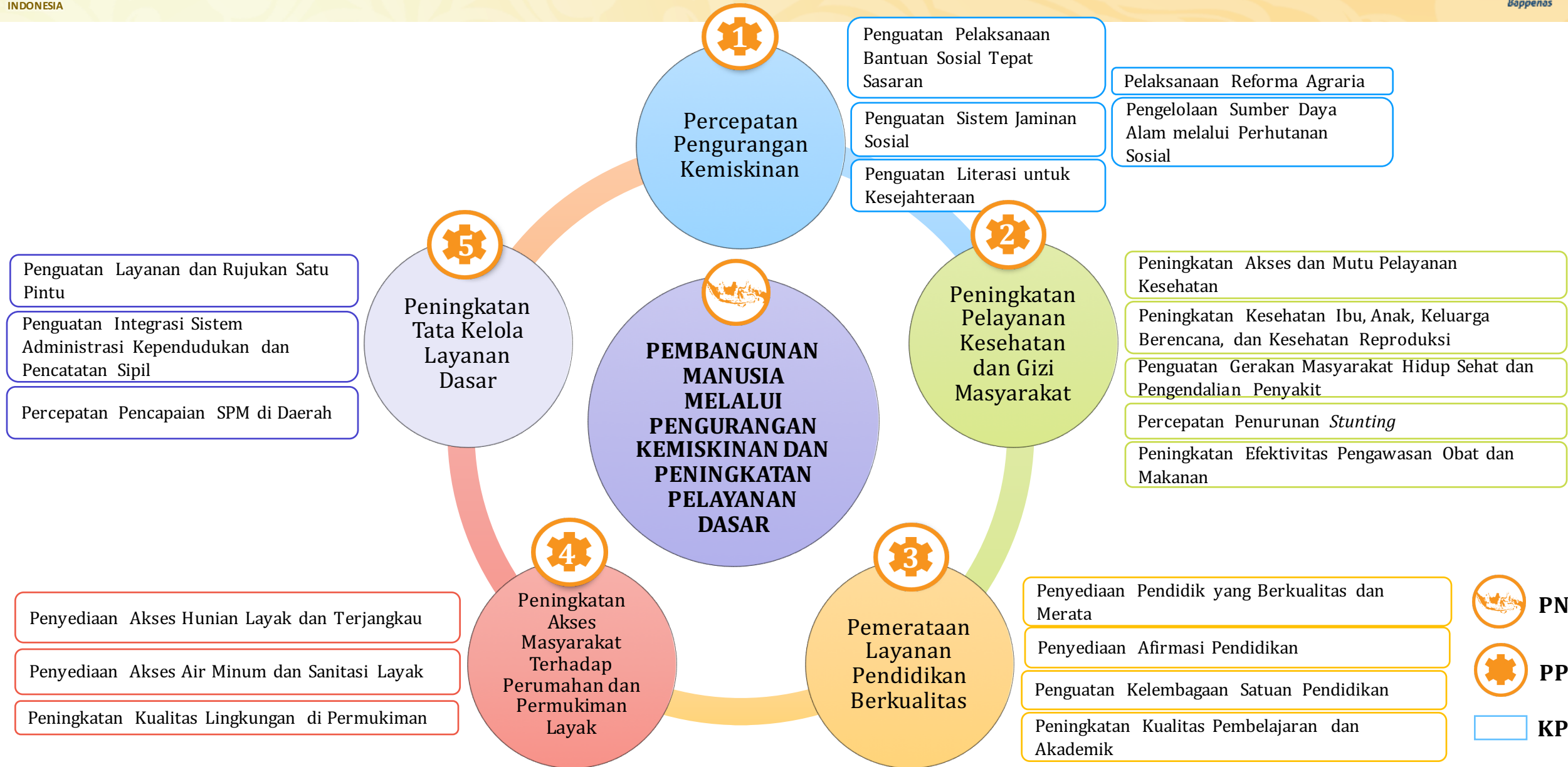
### Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

1. Menyediakan akses hunian layak dan terjangkau.
2. Menyediakan akses air minum dan sanitasi layak.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.



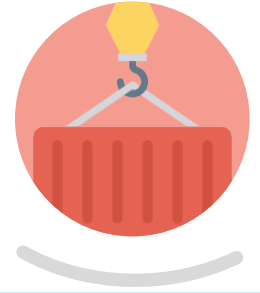
### Meningkatkan Tata Kelola Layanan Dasar

1. Memperkuat layanan dan rujukan satu pintu.
2. Memperbaiki integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil.
3. Mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah.



**Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui  
Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman**

# ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 2



## Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi

1. Mengembangkan pelabuhan hub dan feeder jalur utama dan subsidi tol laut
2. Membangun dan mengembangkan transportasi multimoda dan perkotaan
3. Membangun dan mengembangkan bandara pada jalur utama transportasi
4. Meningkatkan dan menyediakan fasilitas keselamatan transportasi;
5. Menyediakan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; serta
6. Mengembangkan ekosistem TIK untuk ekonomi digital

## Mempercepat Pembangunan Papua dan Papua Barat

1. Meningkatkan akses pelayanan dasar pendidikan berbasis digital, kesehatan jarak jauh, dan pelayanan public
2. Membangun konektivitas, telekomunikasi dan informatika yang dapat menghubungkan provinsi, kab/kota, distrik dan kampung;
3. Menurunkan kemahalan harga; meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengembangkan keterkaitan hulu hilir komoditas unggulan.

## Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

1. Mempercepat pemenuhan pelayanan dasar
2. Mengembangkan perekonomian kawasan & meningkatkan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau terluar, dan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi

## Menanggulangi Dampak Bencana

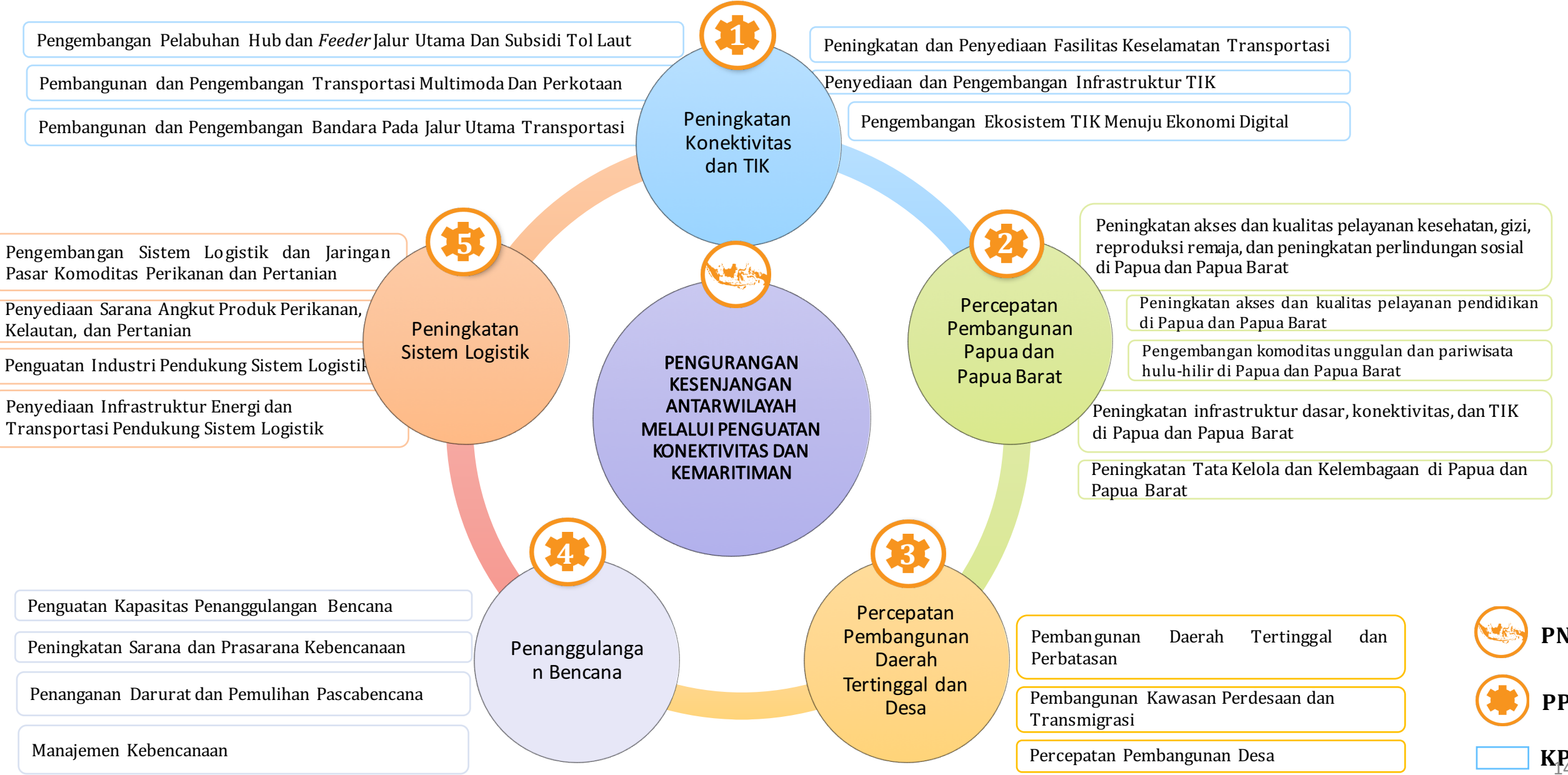
1. Meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan dan ketangguhan pemerintah , pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana; mitigasi bencana;
2. Mengurangi Indeks Risiko Bencana Indonesia

## Meningkatkan Sistem Logistik

1. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi dan distribusi yang handal, efisien dan efektif
2. Mewujudkan Sistem Logistik Perikanan dan Pertanian yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional

# PRIORITAS NASIONAL 2:

## PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN



**Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui  
Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif**



## Sasaran:\*)

### Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

#### 8 Indikator:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Pertumbuhan PDB Pertanian: 3,9-4,1 %          | 4. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 7,5-8,3%       | 7. Penyediaan Lapangan Kerja: 2,6-2,9 Juta Orang    |
| 2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,1-5,6% | 5. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa: 6,0-7,3% | 8. Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja: 4,0 -5,0% |
| 3. Pertumbuhan PDB Perdagangan: 5,4-6,0%         | 6. Nilai Devisa Pariwisata: Rp. 265-280 Triliun |   |

## Arah Kebijakan:

### 1 Meningkatkan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

- a) Meningkatkan Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- b) Mengembangkan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- c) Meningkatkan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- d) Memperkuat Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- e) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

### 2 Mempercepat Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

- a) Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi
- b) Mengembangkan dan Meningkatkan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung
- c) Meningkatkan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan
- d) Mengembangkan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik

### 3 Meningkatkan Nilai Tambah Jasa Produktif \*)

- a) Mempercepat Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, 3 KEK Pariwisata dan Destinasi Unggulan
- b) Memperkuat Struktur Ekonomi Kreatif
- c) Mengembangkan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
- d) Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
- e) Memperluas Akses Keuangan/Pembiayaan

### 4 Mempercepat Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

- a) Meningkatkan Kerja Sama dengan Dunia Usaha
- b) Memperkuat Penyelenggaraan Diklat Vokasi
- c) Memantapkan Sistem Sertifikasi Kompetensi
- d) Meningkatkan Keterampilan Wirausaha

### 5 Mengembangkan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

- a) Mengembangkan penelitian Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas
- b) Mengembangkan dan Memanfaatkan Teknologi Pengungkit Produktivitas
- c) Menyiapkan SDM Iptek (Peneliti, Perekrutan)
- d) Memperkuat Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier

Catatan:

\*) Akan disesuaikan apabila sektor Pariwisata menjadi sektor unggulan: Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi, Industri, dan **Pariwisata** dan Jasa Produktif **Lainnya**



# PRIORITAS NASIONAL 3: PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF \*)



## Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

## ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 4

### PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN DAN SUMBER DAYA AIR



**Meningkatkan produksi energi primer**



**Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi**



**Meningkatkan aksesibilitas energi**



**Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik**



**Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri**



**Meningkatkan layanan pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana prasarana, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan, pemanfaatan inovasi teknologi, serta perkarantinaan (2 KP)**



**Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat**



**Mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan penyediaan pangan yang beragam dan bergizi dengan sumber daya lokal**



**Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air**



**Memberi perlindungan pada sumber air dan ekosistemnya**



**Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata**



**Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS**

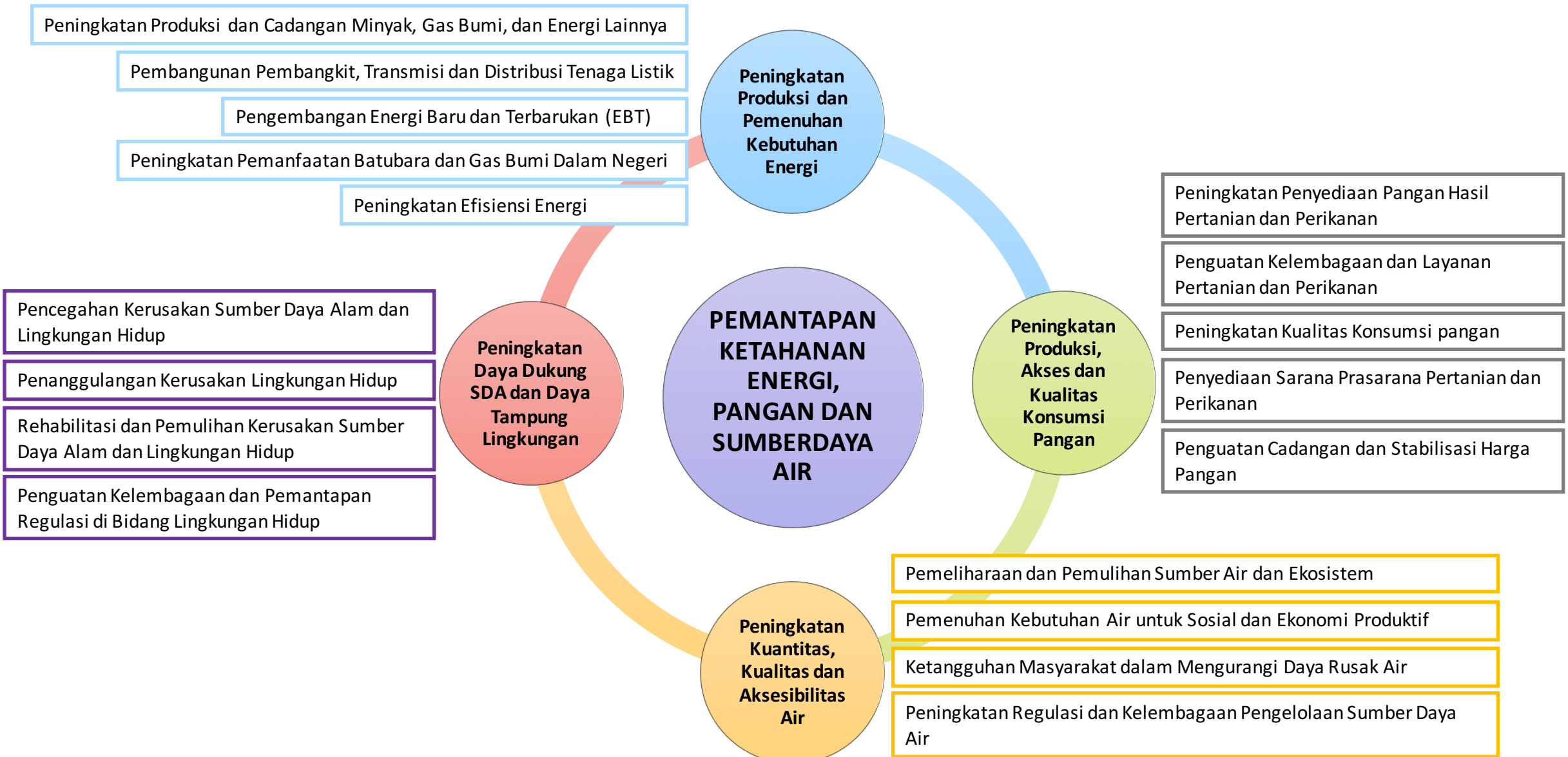


**Meningkatkan kesadaran terkait sumber daya air**



**Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan**

# PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air



## **Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu**

# ARAH KEBIJAKAN PN 5

## Sasaran:

Terjaganya Stabilitas Keamanan dan Suksesnya Pelaksanaan Pemilu

## Arah Kebijakan:



### Memantapkan Kamtibmas Dan Keamanan Siber

- a. Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian
- b. Penanganan konflik sosial
- c. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- d. Pengamanan aktivitas siber
- e. Penanganan terorisme dan radikalisme



### Menyukseskan Pemilu

- a. Peningkatan kualitas lembaga demokrasi
- b. Peningkatan jaminan hak memilih dan dipilih
- c. Perwujudan birokrasi yang netral
- d. Pengamanan penyelenggaraan pemilu



### Memperkuat Pertahanan Wilayah Nasional

- a. Pengamanan wilayah yurisdiksi nasional
- b. Penguatan penjagaan teritorial
- c. Peningkatan kapabilitas pertahanan



### Meningkatkan kepastian hukum dan reformasi birokrasi

- a. Peningkatan kualitas penegakan hukum
- b. Peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi
- c. Integrasi *e-government*
- d. Pengembangan kelembagaan talenta Indonesia



### Meningkatkan efektivitas diplomasi

- a. Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri
- b. Penguatan diplomasi maritim, politik dan keamanan
- c. Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional
- d. Pemantapan peran Indonesia di ASEAN

# PRIORITAS NASIONAL 5: STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU



Prioritas Nasional



Program Prioritas



Kegiatan Prioritas





# 3

## Perkembangan dan Target Makro Tahun 2019 Provinsi DI Yogyakarta



# Share dan Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Produksi Provinsi Yogyakarta

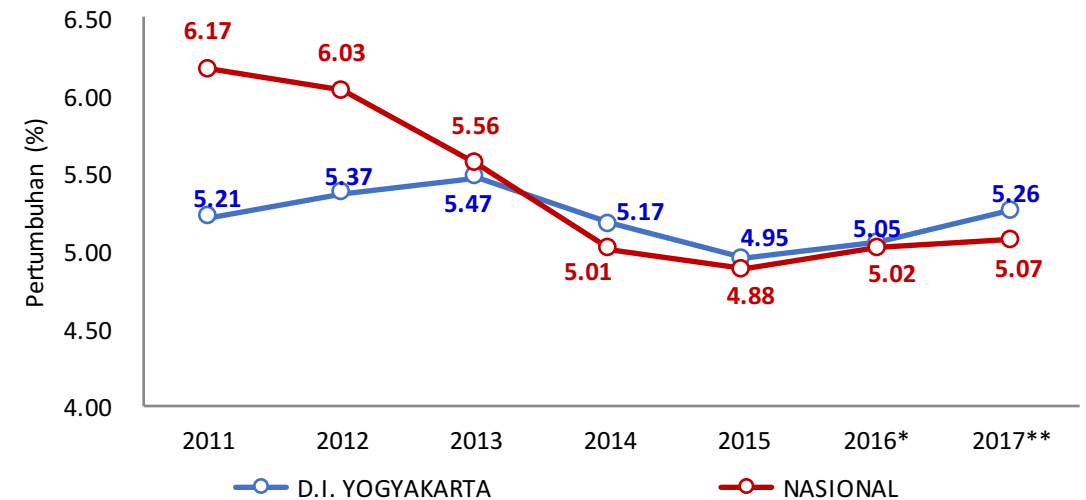
## Peran PDRB Provinsi DIY Terhadap Wilayah Jawa dan Nasional

PROVINSI	Kontribusi 2015 (persen)		Kontribusi 2016 (persen)		Kontribusi 2017 (persen)	
	terhadap pulau	terhadap 34 provinsi	terhadap pulau	terhadap 34 provinsi	terhadap pulau	terhadap 34 provinsi
DKI Jakarta	29,26	17,07	29,41	17,2	29,81	17,43
Jawa Barat	22,43	13,08	22,32	13,06	22,09	12,92
Jawa Tengah	14,88	8,68	14,75	8,63	14,68	8,59
DI Yogyakarta	1,49	0,87	1,49	0,87	1,47	0,86
Jawa Timur	24,9	14,53	25,06	14,65	24,97	14,61
Banten	7,04	4,11	6,97	4,08	6,98	4,08
Jawa	-	58,34	-	58,49	-	58,49

## Share Kabupaten dan Kota terhadap D.I Yogyakarta Tahun 2016

KABUPATEN/KOTA	Nilai (Rp. Miliar)		Share (%)	
	2015*)	2016**)	2015*)	2016**)
Kab. Kulon Progo	7,672	8,312	7.56	7.55
Kab. Bantul	19,325	20,925	19.06	19.00
Kab. Gunung Kidul	13,799	14,982	13.61	13.60
Kab. Sleman	33,827	36,991	33.36	33.59
Kota Yogyakarta	26,793	28,916	26.42	26.26
Jumlah	101,415	110,127	100.00	100.00

## Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Nasional Tahun 2011-2017, (persen)



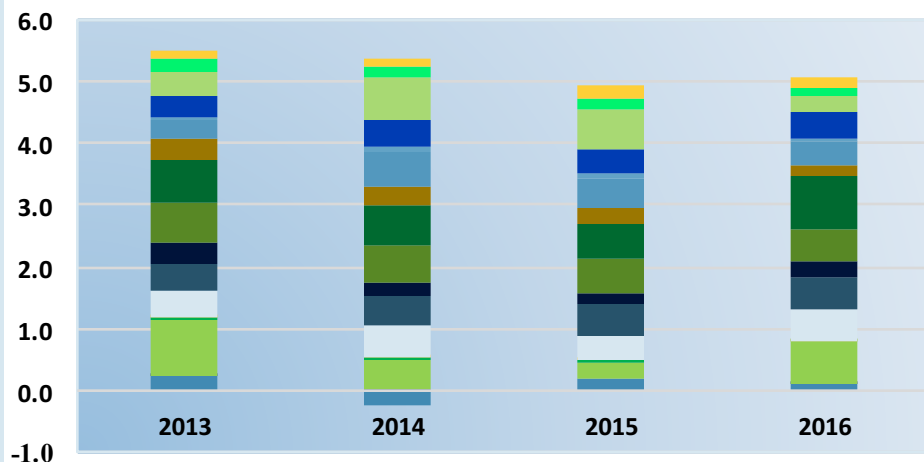
Keterangan:

\* Angka sementara \*\* Angka sangat sementara

- Kontribusi perekonomian DIY terhadap perekonomian Wilayah Jawa yaitu hanya berkisar 1,49 – 1,51 persen. Pada tahun 2016 kontribusi DIY sedikit menurun sebesar 0,02 persen.
- Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta cenderung mengalami perlambatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015, dan kembali meningkat pada tahun 2016 dan 2017.
- Secara spasial, kontribusi terbesar perekonomian D.I Yogyakarta dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

# Share dan Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Produksi

**Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta  
Pada Pendekatan Produksi Tahun 2013-2016**



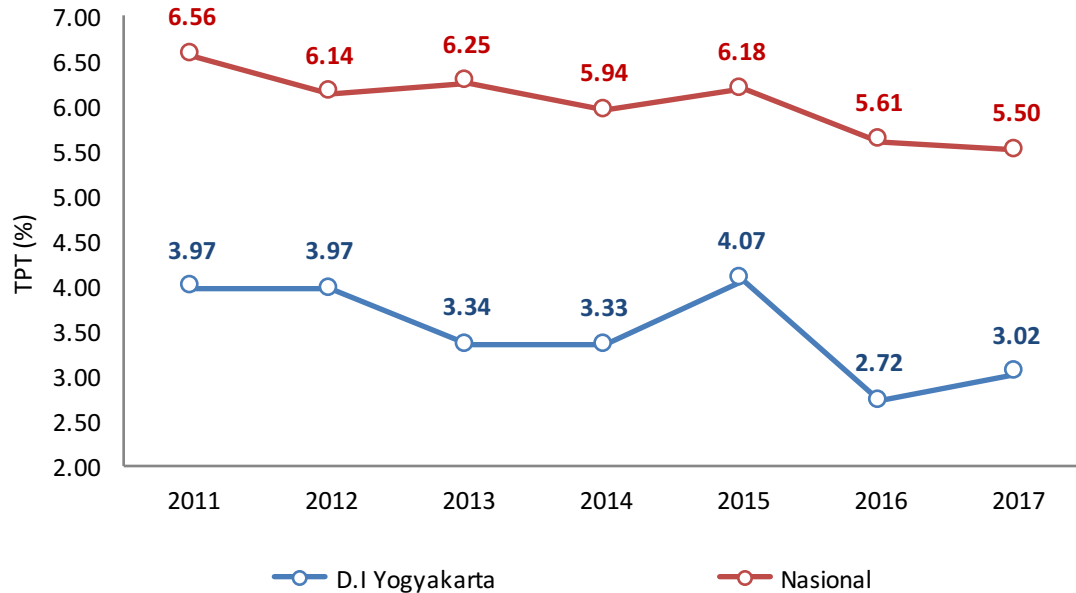
- Jasa lainnya/Other Services Activities
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Pendidikan
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Perusahaan
- Real Estat
- Jasa Keuangan dan Asuransi
- Informasi dan Komunikasi
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Transportasi dan Pergudangan
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Konstruksi
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Industri Pengolahan
- Pertambangan dan Penggalian
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

LAPANGAN USAHA	Share ADHB (%)					Rata-rata
	2012	2013	2014	2015*	2016**	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,18	11,13	10,52	10,64	10,41	10,78
Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,58	0,58	0,56	0,54	0,57
Industri Pengolahan	13,26	13,62	13,59	13,11	13,21	13,36
Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,10	0,11	0,12	0,13	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11
Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,36	9,34	9,42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,30	8,17	8,27	8,22	8,48	8,29
Transportasi dan Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,68	5,68	5,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,32	9,75	10,04	10,23	10,22	9,92
Informasi dan Komunikasi	9,49	8,92	8,51	8,13	8,14	8,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,73	3,88	3,97	3,94	3,80
Real Estat	7,03	6,85	7,00	7,02	7,09	7,00
Jasa Perusahaan	1,08	1,01	1,03	1,03	1,01	1,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,68	7,89	8,07	8,26	8,37	8,05
Jasa Pendidikan	8,24	8,03	8,19	8,48	8,25	8,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51	2,49
Jasa lainnya	2,57	2,53	2,53	2,55	2,57	2,55

- Kontribusi terbesar perekonomian D.I Yogyakarta di sokong dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; dan sektor informasi dan komunikasi.
- Sumber pertumbuhan perekonomian D.I Yogyakarta : sektor industri pengolahan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor konstruksi; dan sektor perdagangan besar dan eceran.

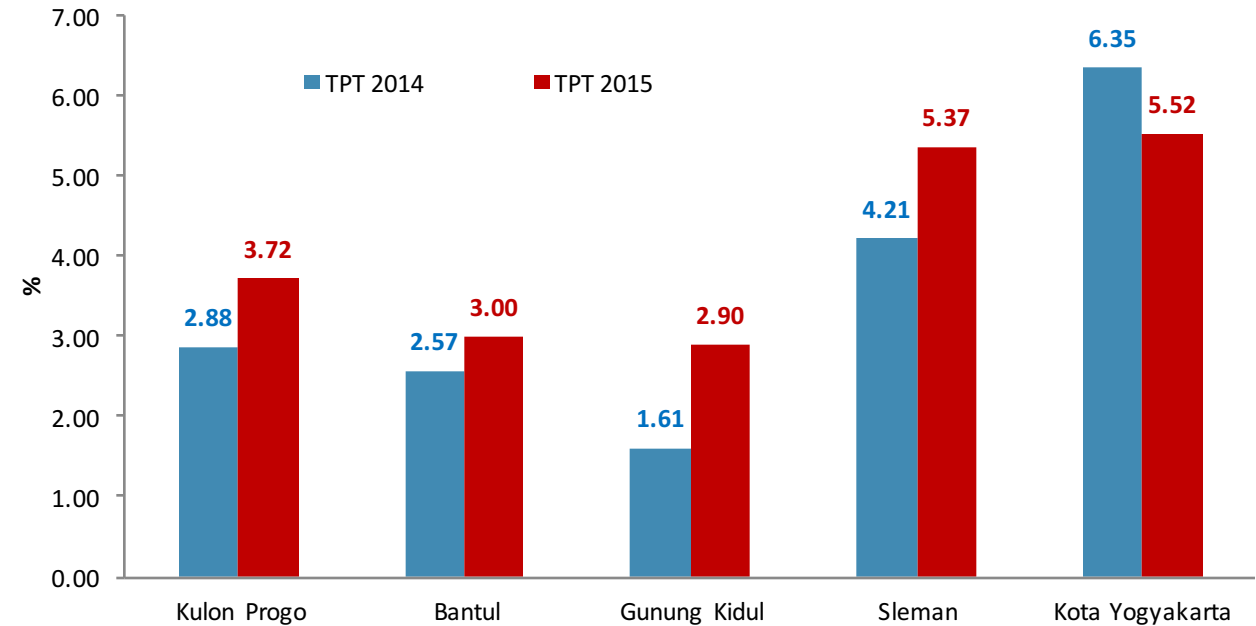
# Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka .....

**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
D.I Yogyakarta dan Nasional Tahun 2011-2017**



- Tingkat pengangguran di D.I Yogyakarta relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional. Secara umum, pola pergerakan penurunan dan peningkatan tingkat pengangguran terbuka DI. Yogyakarta sama dengan pola pergerakan penurunan tingkat pengangguran nasional.

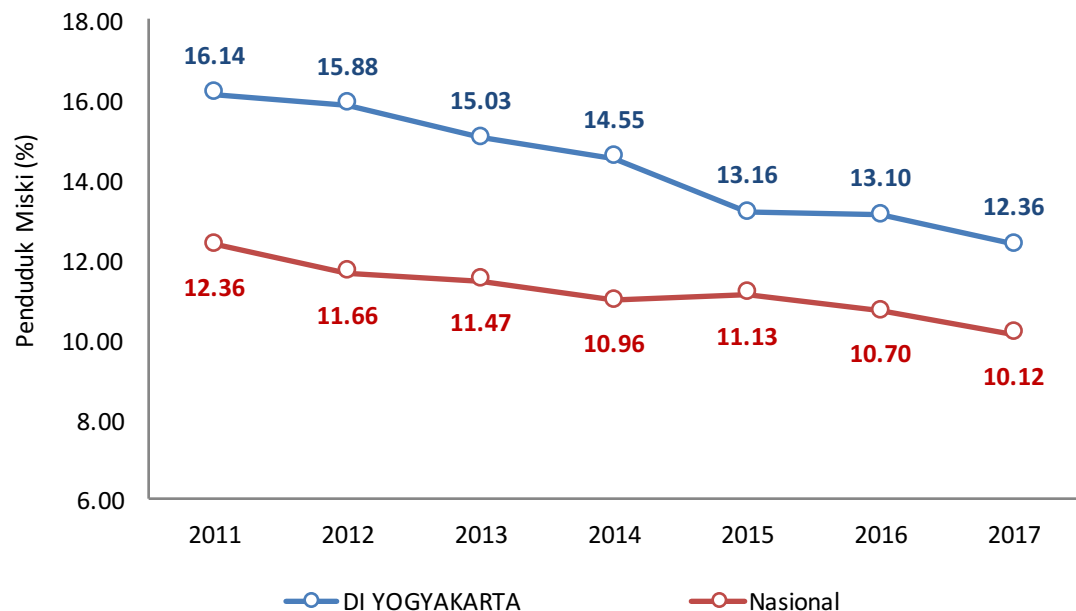
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota  
di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2014 dan 2015 (%)**



- Secara spasial TPT kabupaten/kota relatif masih rendah dibandingkan terhadap TPT nasional dan provinsi, kecuali di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
- Terjadi peningkatan TPT di 4 (empat) kabupaten, yaitu di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman.

# Tingkat Kemiskinan tinggi dengan penurunan relatif melambat

**Perkembangan Penduduk Miskin (%) D.I Yogyakarta dan Nasional Tahun 2011-2017 (Sept).**



- Dalam enam tahun terakhir perkembangan tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta cenderung menurun, namun kondisi kemiskinan relatif tinggi dibandingkan terhadap rata-rata tingkat kemiskinan nasional.

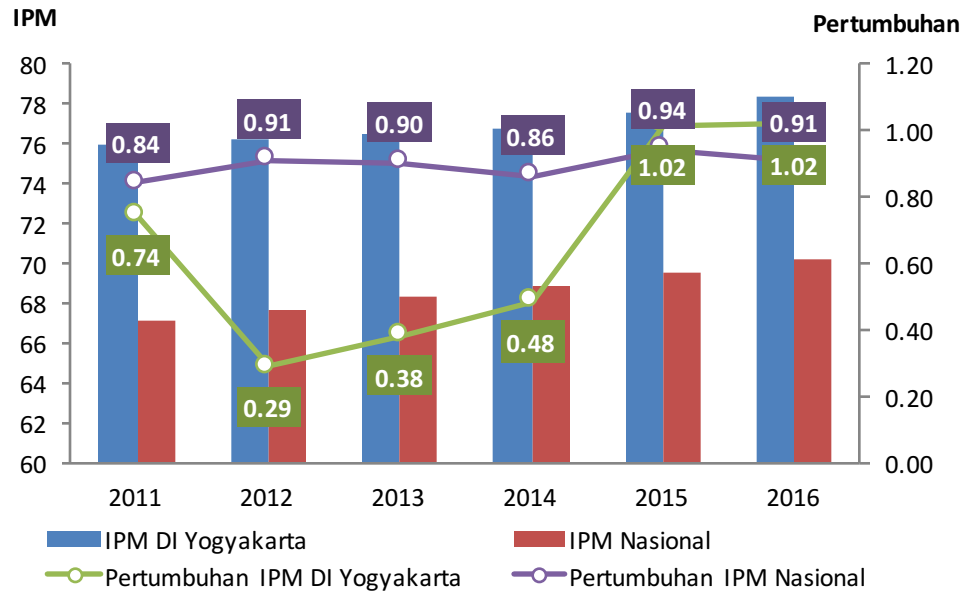
**Kondisi Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2016 (Maret)**

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)
Kulon Progo	84.34	20.30	3.55	1.00	297,353
Bantul	142.76	14.55	2.02	0.41	332,057
Gunung Kidul	139.15	19.34	4.16	1.30	264,637
Sleman	96.63	8.21	1.36	0.34	334,406
Kota Yogyakarta	32.06	7.70	1.05	0.19	401,193
<b>D.I YOGYAKARTA</b>	<b>494.94</b>	<b>13.34</b>	<b>2.30</b>	<b>0.59</b>	<b>354,084</b>
<b>NASIONAL</b>	<b>28.005,39</b>	<b>10,86</b>	<b>1,94</b>	<b>0,53</b>	<b>343.647</b>

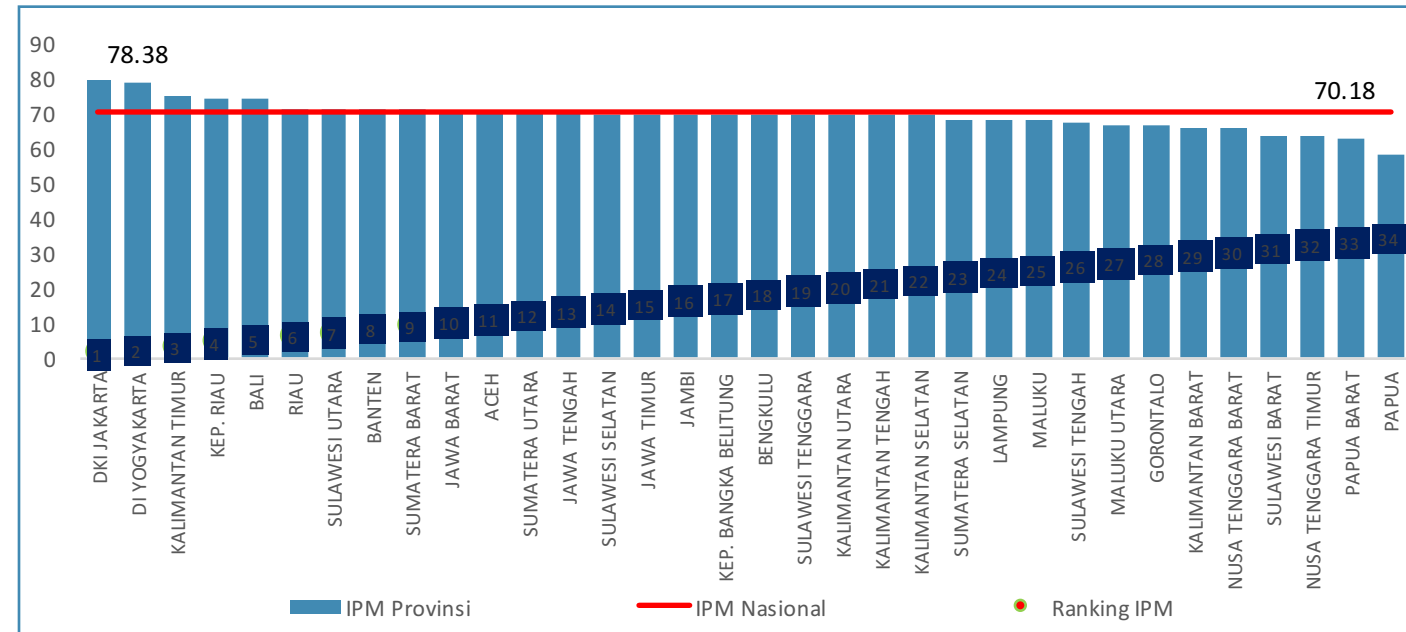
- Secara spasial tingkat kemiskinan masih tinggi baik dilihat dari persentase penduduk miskin, P1, dan P2 yaitu di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul .

# IPM tinggi diatas rata-rata nasional

Perkembangan IPM Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2011-2016



Perbandingan IPM Per Provinsi Tahun 2016



IPM Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta Tahun 2016

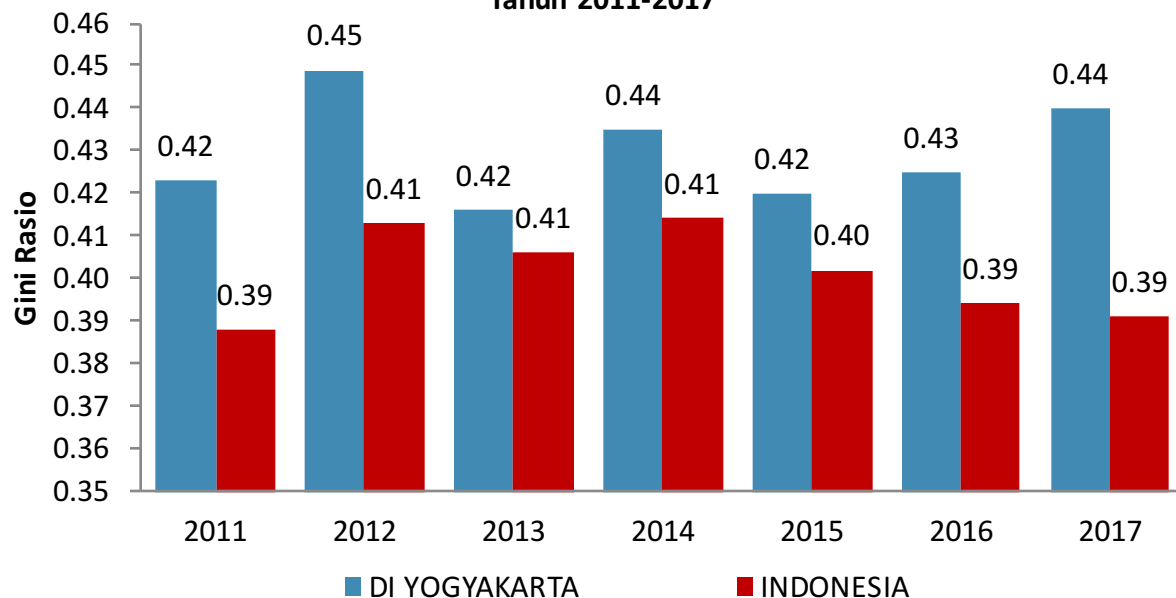
Kabupaten /Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM
Kulon Progo	75,00	13,55	8,40	8.688	71,52
Bantul	73,44	14,72	9,08	14.320	77,99
Gunung Kidul	73,69	12,92	6,46	8.336	67,41
Sleman	74,57	15,77	10,30	14.562	81,20
Kota Yogyakarta	74,25	16,32	11,41	17.317	84,56
<b>D.I YOGYAKARTA</b>	<b>74,68</b>	<b>15,03</b>	<b>9,00</b>	<b>12.684</b>	<b>77,59</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>70,78</b>	<b>12,55</b>	<b>7,84</b>	<b>10.150</b>	<b>69,55</b>

- IPM Provinsi D.I Yogyakarta relatif tinggi dibandingkan terhadap rata - rata IPM nasional. Namun pertumbuhan IPM rata-rata masih di bawah pertumbuhan IPM nasional, kecuali pada tahun 2015 dan 2016 tumbuh di atas rata-rata nasional.
- IPM Provinsi Yogyakarta secara nasional berada di urutan 2 dibandingkan seluruh 34 Provinsi di Indonesia.
- Kondisi IPM Kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta relatif tinggi dibandingkan rata-rata IPM nasional, kecuali Kab. Gunung Kidul masih jauh tertinggal dari rata-rata IPM provinsi dan nasional

# Isu Kesenjangan di Provinsi DI Yogyakarta

## Kesenjangan Antarindividu dan PDRB Kabupaten/Kota

Perkembangan Gini Rasio Provinsi D.I Yogyakarta dan Nasional  
Tahun 2011-2017



- Kesenjangan antar individu di Provinsi D.I Yogyakarta relatif masih berada di atas nasional, dan perkembangan dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat, pada tahun 2015 dengan nilai ratio gini yang sebesar 0,42 dan tahun 2017 0,44.

Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta  
Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita ADHB (Rp. Juta)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Kulonprogo	13,95	14,84	16,10	17,25	18,59
Kab. Bantul	14,41	15,53	17,04	18,55	20,06
Kab. Gunungkidul	14,22	15,23	16,47	17,75	19,34
Kab. Sleman	21,29	22,79	24,78	26,69	28,91
Kota Yogyakarta	48,40	51,65	55,97	60,53	65,15

- Perkembangan PDRB perkapita dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan di semua kabupaten/kota, namun diperbandingkan antar wilayah menunjukan adanya gap yang cukup tinggi antara PDRB perkapita tertinggi (Kota Yogyakarta) dengan PDRB perkapita terendah (Kabupaten Kulon Progo).

**PERTUMBUHAN  
EKONOMI**

**DIY: 5,65 %**

**NASIONAL:  
5,60 %**

**PENDUDUK  
MISKIN**

**DIY: 12,39 %**

**NASIONAL:  
8,50 -9,50 %**

**TINGKAT PENGANGGURAN  
TERBUKA**

**DIY: 2,70 %**

**NASIONAL:  
4,80 -5,20 %**

**INDEK PEMBANGUNAN  
MANUSIA**

**DIY: 81,43**

**NASIONAL:  
71,98**



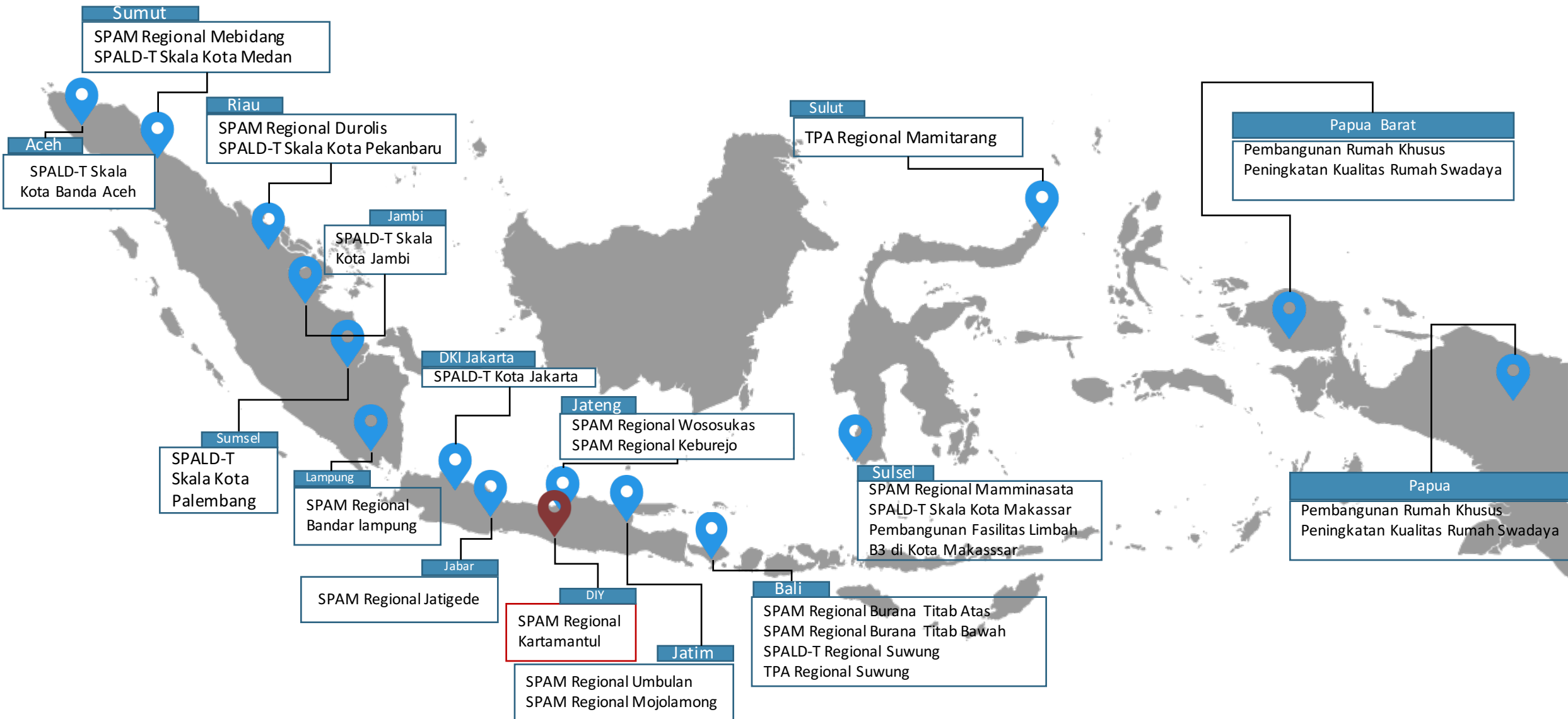
# 4

## Usulan Kegiatan di Provinsi DIY Tahun 2019



# PROGRAM PRIORITAS 4 PN 1: PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK

## SEBARAN LOKASI PROYEK PRIORITAS

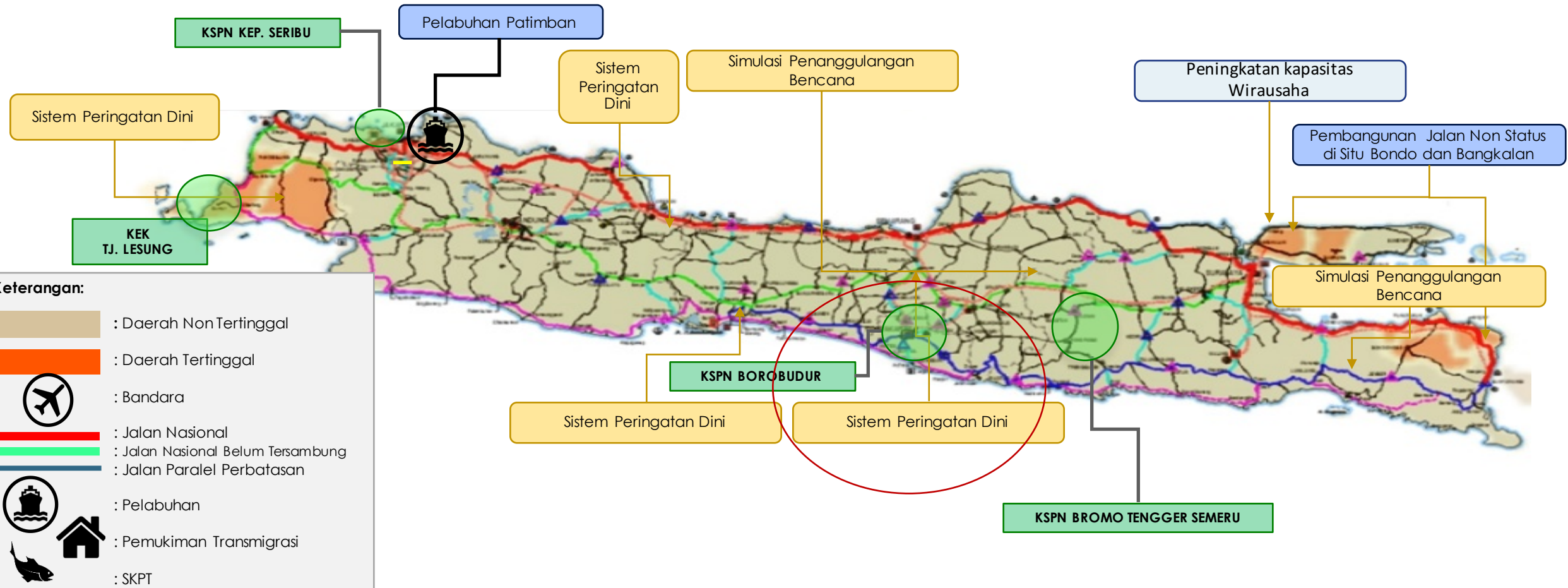


Kegiatan di lokasi lain merupakan kegiatan reguler

# INTEGRASI OUTPUT PRIORITAS NASIONAL 2 WILAYAH JAWA

Keterangan :

- PP Konektivitas
- PP Dating & Desa
- PP Bencana



# ***HIGHLIGHT* USULAN KEGIATAN HASIL RAKORTEK PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

## **Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar**

- Sosialisasi dan internalisasai Program KKBPK di Kampung KB
- Dukungan media promosi KIE program KKBPK
- Pemberian suplementasi gizi
- Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter PAUD, SD, SMP
- Pelayanan kesehatan Ibu
- Pembangunan rumah susun sederhana sewa
- Pembangunan rumah khusus bagi warga miskin terdampak bandara

## **Prioritas Nasional 2 : Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman**

- Penyusunan Masterplan Kulon Progo Smart City
- Pembangunan Pansela (JJLS) Ruas Legundi-Planjan

# ***HIGHLIGHT* USULAN KEGIATAN HASIL RAKORTEK PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

## **Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, Dan Jasa Produktif**

- Revitalisasi Pasar Rakyat
- Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Wilayah Tebing Breksi (1. Pengadaan alat dan film untuk pertunjukan laser di tebing Breksi 2. Pembuatan Amphitheater di Tebing Breksi)
- Pengembangan Desa Wisata Nawung
- Peningkatan sarana prasarana pariwisata (pembenahan kawasan gardu pandang jurang boyong kaliurang, pembenahan pagar pembatas, pembuatan jalan setapak dan areal parkir)
- Pembenahan kawasan open museum bakalan di Cangkringan (pembuatan pagar pembatas, pembuatan walking path, pembuatan toilet, mushola dan titik kumpul)
- Pengembangan Destinasi Wisata DPD Songgo Langit (Pleret, Imogiri, Dlingo dan Piyungan)

## **Prioritas Nasional 4: Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air**

- Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Merah
- Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Aneka Cabai (Cabai Merah dan Cabai Rawit)
- Pemberdayaan Pekarangan Pangan
- Bantuan Sarana produksi perikanan
- Fasilitas Kegiatan Pasar Murah

**TERIMA KASIH**